



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan 1. Ketua Dewan Kawasan Batam; 2. Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Riau; 3. Ketua KADIN Kota Batam.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	19 (sembilan belas)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 11 April 2017
W a k t u	:	Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG), didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra); 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD); 4. H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Hanura.
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas penyelenggaraan pelayanan publik oleh BP Batam yang tidak berjalan dengan baik, khususnya terkait lahan dan kepelabuhanan, sehingga menimbulkan keresahan dalam berusaha dan berinvestasi di Batam
Hadir	:	a. dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI; b. Perwakilan DPRD Kota Batam; c. Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Riau; d. Ketua KADIN Kota Batam; e. Para Pelaku Usaha di Batam.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perwakilan DPRD Kota Batam, Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KADIN Kota Batam, dan Para Pelaku Usaha di Batam dibuka pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat pada hari Selasa, 11 April 2017 membahas penyelenggaraan pelayanan publik oleh BP Batam yang tidak berjalan dengan

baik, khususnya terkait lahan dan kepelabuhanan, sehingga menimbulkan keresahan dalam berusaha dan investasi di Batam.

3. Ketua Rapat mempertanyakan ketidakhadiran Ketua Dewan Kawasan Batam dalam RDP hari ini.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Perwakilan DPRD Kota Batam, Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KADIN Kota Batam, dan Para Pelaku Usaha di Batam untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di Kota Batam, akibat pelayanan publik oleh BP Batam yang tidak berjalan dengan baik, khususnya terkait lahan dan kepelabuhanan, yang menimbulkan keresahan dalam berusaha dan berinvestasi di Batam.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Perwakilan DPRD Kota Batam, Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KADIN Kota Batam, dan Para Pelaku Usaha di Batam.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi VI DPR RI akan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara BP Batam dengan para pelaku usaha di Batam sehubungan dengan pelaporan dari Perwakilan DPRD Kota Batam, Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KADIN Kota Batam, dan Para Pelaku Usaha di Batam.
2. Komisi VI DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik ke Kota Batam untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di atas.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.